

**SKRIPSI**  
**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)**  
**DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk mencapai derajat Sarjana S-1

**Program Studi Ilmu ADMINISTRASI NEGARA**



**OLEH :**  
**ZULKARNAIN**  
**10975005764**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**1434 H/ 2013 M**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PULAU  
TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: ZULKARNAIN, 10975005764 Admininstrasi Negara, 101 Halaman, 2012**

**ABSTRAK**

*Badan Permasyarakatan Desa merupakan nuansa tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya adalah mewujudkan suatu demokrasi yang ada ditingkat desa. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang menjadi tolak ukur Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya. Didalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut telah telah diuraikan dengan jelas, selain itu peran dari masyarakat dalam berpartisipasi juga ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) jika tidak maka semua itu juga tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi untuk melaksanakan itu maka tata pemerintahan ditingkat desa harus menciptakan tata komunikasi, komitmen dan harus melibatkan semua pihak yang ada di desa tersebut.*

*Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, penulis mengamati dan memperoleh data-data lapangan yang mengindikasikan bahwa tidak terlaksananya peranan Badan Permasyarakatan Desa di desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu: 1. Kurangnya komunikasi antar sesama anggota BPD tersebut, 2. Adanya kepentingan antar individu dan kelompok, 3. Tidak adanya Komunikasi dengan masyarakat, 4. Kurang nya pemahaman BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai upaya memahami inti permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah anggota BPD 5 orang, aparatur desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa sebagai perwakilan pemerintah, kepala dusun 4 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan ketua pemuda 1 orang yang dijadikan sampel, karena mereka sudah mewakili masyarakat pada umumnya. Dari data primer (lapangan) dan sekunder (studi kepustakaan) diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan lah kesimpulan bahwa peranan Badan Permasyarakatan Desa di desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Otonomi Daerah .....	9
2.2. Pengertian Otonomi Desa .....	11
2.3. Pengertian Pemerintah Desa .....	15
2.4. Pengertian BPD .....	20
2.5. Indikator Peranan BPD .....	26
2.6. Peranan BPD .....	31
2.7. Defenisi Konsep .....	35
2.8. konsep operasional.....	37
2.9 Teknik Pengukuran.....	38
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis penelitian.....	40
3.2. Waktu dan Tempat .....	40
3.3. Jenis dan Sumber Penelitian .....	40
3.4. Populasi dan Sampel.....	41
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.6. Analisis Data.....	43

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

4.1. Lokasi Penelitian .....	44
4.2. Gambaran Umum Badan Permasyarakatan Desa .....	49

**BAB V : HASIL DAN ANALISA DATA**

5.1. Karakteristik Responden .....	55
5.2. Jawaban responden tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa diDesa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden .....	86
5.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peranan BPD .....	88

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	95
6.2. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Indikator Peranan BPD di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
Tabel III.1	: Populasi dan Sampel .....	41
Tabel IV.1	: Jumlah Penduduk Desa Pulau Tengah .....	46
Tabel IV.2	: Data Pekerjaan Penduduk Desa Pulau Tengah .....	47
Tabel IV.3	: Gambaran Hasil Produksi Pertanian Penduduk Desa Pulau Tengah.....	48
Tabel IV.4	: Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penduduk Desa Pulau Tengah.....	48
Tabel IV.5	: Sarana Pendidikan.....	48
Tabel V.1	: Distribusi Responden Berdasarkan Alamat,Tempat Tinggal.....	56
Tabel V.2	: Distribusi Responden Menurut Usia .....	56
Tabel V.3	: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel V.4	: Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Lahir .....	57
Tabel V.5	: Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	58
Tabel V.6	: Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	59
Tabel V.7	: Distribusi Jawaban Responden Tentang Menetapkan Peraturan Desa .....	62
Tabel V.8	: Distribusi Jawaban Responden Tentang Membuat Rancangan Peraturan Desa.....	63

Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengajukan Perubahan Setiap Rencana Peraturan Desa.....	64
Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Peraturan Desa yang Telah ditetapkan .....	65
Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Tentang Peraturan yang dibahas sesuai keinginan masyarakat .....	66
Tabel V.12 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Legislasi.....	67
Tabel V.13 : Distribusi Jawaban Responden dalam pengawasan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya	69
Tabel V.14 : Distribusi Jawaban Responden dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes .....	70
Tabel V.15 : Distribusi jawaban Responden dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa .....	71
Tabel V.16 : Distribusi Jawaban Responden dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa .....	71
Tabel V.17 : Distribusi Jawaban Responden dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan.....	72
Tabel V.18 : Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap pengawasan....	73
Tabel V.19 : Distribusi Jawaban Responden dalam peran menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.....	75
Tabel V.20 : Distribusi jawaban Responden dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa .....	75

Tabel V.21 : Distribusi Jawaban Responden dalam BPD turun langsung untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.....	76
Tabel V.22 : Distribusi Jawaban Responden dalam menyikapi aspirasi masyarakat.....	76
Tabel V.23 : Distribusi Jawaban Responden dalam menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan masyarakat .....	78
Tabel V.24 : Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .....	79
Tabel V.25 : Distribusi jawaban Responden dalam peran memberikan pertimbangan kepada kepala desa mengenai perjanjian kerjasama desa .....	80
Tabel V.26 : Distribusi Jawaban Responden dalam terlibat secara langsung mengenai kerjasama desa.....	81
Tabel V.27 : Distribusi Jawaban Responden dalam perjanjian kerjasama desa sudah menimbangkan aspirasi masyarakat.....	82
Tabel V.28 : Distribusi Jawaban Responden dalam mensosialisasikan bentuk kerjasama desa yang telah disetujui .....	83
Tabel V.29 : Distribusi Jawaban Responden dalam melakukan evaluasi terhadap kerja sama desa.....	83

Tabel V.30 : Rekapitulasi jawaban Responden tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .....	85
Tabel V.31 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan BPD di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi .....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Badan Perwakilan Desa yang semula diharapkan dapat menjalankan fungsi check and balance di Desa, telah dikurangi perannya. Di desa, berdasarkan undang-undang ini, tidak mengenal lagi lembaga perwakilan. Yang ada adalah lembaga permusyawaratan desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 209 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa :

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa, antara lain :

1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung  
Dalam hal ini masyarakat tidak diikutkan dalam pemilihan dimana pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut hanya di ketahui perangkat-perangkat desa, kemudian setelah ditanyakan kepada masyarakat mereka pun tak banyak yang tahu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Keanggotaan berbasis individu yang tidak mencerminkan keanggotaan desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut hanya diisi oleh orang-orang tidak mengetahui apa yang menjadi perannya sebagai anggota BPD. Hal ini menyebabkan tidak adanya kemajuan Desa.

3. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa

Peraturan yang di buat anggota BPD tersebut hanya bersifat formalitas saja. Sedangkan peraturan masih digunakan peraturan yang lama yang di buat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdahulu.

Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Desa No.6 Tahun 2012 yang berisi tentang :

- 1) Pertanian
- 2) Galian C
- 3) Peternakan
- 4) Muda- Mudi
- 5) Keagamaan
- 6) Sosial
- 7) Budaya
- 8) Kebersihan
- 9) Adat

Peraturan Desa ini sudah ada sejak lama namun implementasinya belum berjalan sebagai mana mestinya.

4. Fungsi kontrol ada pada Badan Musyawarah Desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.

BPD tidak bisa mengontrol pemerintah desa, karena anggota nya tidak pernah ikut dalam setiap rapat pemerintahan, sehingga apapun keputusan pmerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengikuti.

Dan apabila ada kesalahan Badan Permusyawaratan Desa BPD tidak bisa memberikan sanksi kepada Kepala Desa.

5. Sebagian besar Badan Musyawarah Desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah.

Setiap keputusan yang dikeluarkan bersama-sama pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu membenarkan tanpa melihat apakah keputusan bersama itu bisa mewakili masyarakat atau tidak.

Inilah yang membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini hanya alat pembenaran pemerintah.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Peranan BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak permasalahan yang belum diselesaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean sehingga kesimpulan awal yang didapat oleh peneliti bahwa Peranan BPD di desa tidak dilaksanakan dengan baik Kemudian Peraturan Desa yang di buat tersebut masih bersifat lama. ataukah ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu ***“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.”***

### **1.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa khususnya di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Dalam suatu penelitian untuk memperdalam suatu masalah, maka fungsi dan kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arahan penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian pemecahan masalah tampak lebih jelas dan sistematis sesuai dengan teori itu sendiri.

Untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperlukan arah dan landasan berpikir yang jelas dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan memberikan beberapa konsep teori atau pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh para ahli.

#### **1.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang dianut oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang serta Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD.

Kinerja penyelenggaraan Otonomi Daerah, yaitu Pemerintah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

UU No.32 Tahun 2004 antara lain mengatur hal-hal:

1. Pembentukan Daerah dan kawasan khusus
2. Pembagian Urusan Pemerintahan
3. Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kepegawaian Daerah
5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Keuangan Daerah
8. Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan
9. Kawasan Perkotaan
10. Desa
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah

## **1.2. Otonomi Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya UU No.5 Tahun 2005 menjelaskan tentang UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tertentu.

Dengan PP No.38 Tahun 2007 tersebut urusan Pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat jelas dan rinci. Dalam memperkuat Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan kepada Desa antara lain:

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Bidang Penanaman Modal
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Bidang Kesehatan
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
10. Bidang Sosial
11. Bidang Penataan Ruang
12. Bidang Pemukiman/Perumahan
13. Bidang Pekerjaan Umum
14. Bidang Perhubungan
15. Bidang Lingkungan Hidup
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
17. Bidang Otonomi Desa
18. Bidang Perimbangan Keuangan
19. Bidang Tugas Pembantuan
20. Bidang Pariwisata
21. Bidang Pertanahan
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
24. Bidang Perencanaan
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
28. Bidang Pemuda dan Olahraga
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
30. Bidang statistik, Arsip dan Perpustakaan

Itulah urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi kompetensi Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturan dan kepengurusan kepada Desa. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Desa Otonom adalah desa yang di bentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa Otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena di atur dalam Undang-Undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara. (Hanif Nurcholis, 2011: 65).

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang

memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### **1.3. Pemerintahan Desa**

Sementara itu dalam sistem Pemerintahan Indonesia juga dikenal Pemerintahan Desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata Pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat Pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak Pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian pemerintahan desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa :

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan



menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 tentang pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

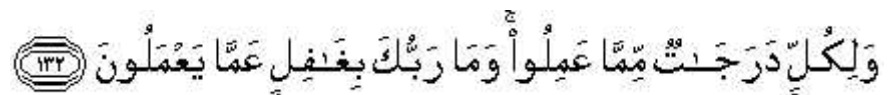
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Kepala Desa yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

13. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. **(al-an'am :132)**



Artinya : *“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya”*. **(Al-An'am : 132)**

Ini adalah pesan iman yang membawa manusia kepada orientasi nilai dan kulalitas. Al-Qur'an menggandengkan iman dengan amal soleh sebanyak 77 kali. Pekerjaan yang standar adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat, secara material dan moral-spritual. Tolak ukurannya adalah pesan syariah yang semata-mata merupakan rahmat bagi manusia. Jika tidak diketahui adanya pesan khusus dari agama, maka seseorang harus memperhatikan pengakuan umum bahwa sesuatu itu bermanfaat, dan berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu. Jika hal ini pun tidak dilakukan, minimal kembali kepada

pertimbangan akal sehat yang didukung secara nurani yang sejuk, lebih-lebih jika dilakukan melalui media shalat meminta petunjuk. Dengan prosedur ini, seorang muslim tidak perlu bingung atau ragu dalam memilih suatu pekerjaan.

#### **1.4. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
3. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentang dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

4. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang.
2. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang.

3. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (Sembilan) orang.
4. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 11 (sebelas) orang.
5. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan mengikat. Pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 2, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dan/atau Pemuka masyarakat lainnya, dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, serta beberapa persyaratan lain yang mengikat.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah pasal 15 dan 16 mengatur 9 butir tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
7. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
8. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
9. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

Adapun Hak Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten kuantan singingi No. 1 Tahun 2009, yaitu :

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
2. Pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten kuantan singingi No. 1 Tahun 2009 pasal 20, yaitu :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, Menampung, Menghimpun dan Menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan Kepala Desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono;2006 terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat

menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

#### **1.5. Indikator Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah : Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Menurut Biddle dan Thomas, Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Adapun makna dari kata “Peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang actor dalam sebuah pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (role performance)”. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalisasi dan paham interaksionis. Paham strukturalisasi lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normative telah direncanakan oleh sistem budaya.

Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (role performance), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan.

Menurut Beck, William dan Rawlin 1986 hal 293 pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalam suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.1 Tahun 2009 Pasal 16 mengatur 9 butir tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
7. memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;

8. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
9. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

Adapun Hak Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 pasal 19, yaitu :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat.

Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 pasal 20, yaitu :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan Kepala Desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### **1.6. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya tidak lepas dari berbagai hal. Seperti halnya BPD dalam menjalankan perannya dalam mencapai tujuan, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa yang menjadi tugas nya serta pengaruhnya bagi masyarakat.

Berdasarkan yang mempengaruhi pelaksanaan peranan BPD yaitu legislasi, pengawasan, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pertimbangan mengenai kerja sama di desa.

##### **1. Legislasi**

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD

lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Di dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan



sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Antara perencanaan yang dibuat oleh BPD, Baik dalam bentuk peraturan, program pembangunan dan lainnya tidak terlepas dari pengawasan, hal ini bertujuan sebagai proses pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan ini dilakukan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. Terkadang Kepala Desa Pulau Tengah mendominasi dalam hal pemerintahan, hal ini disadari sepenuhnya oleh unsur penyelenggara pemerintahan sebab melihat tingkat pendidikan dan SDM di desa ini masih rendah sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu namun hal tersebut tidak sampai menjadi konflik sebab kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa Pulau Tengah.

### 3. Menampung, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi

masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut Menurut Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Suhaidiman, yang mengatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat kemudian masyarakat jangan segan-segan untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD atau pemerintah desa. (Wawancara, 6 Desember 2012).

Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota BPD. Orang-orang yang menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus

tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

#### 4. Memberikan, Pertimbangan Kerja Sama Desa

Ada tidaknya BPD memberikan pertimbangan mengenai kerja sama desa dapat dilihat dari bentuk kerja sama yang telah dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain inilah, menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa saran yang diberikan oleh BPD masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Memberikan Pertimbangan Kerja Sama Desa yang diberikan masih jauh dari harapan masyarakat.

### 2.7. Defenisi Konsep

Menurut masri singarimbun (2006:34) Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, dan individu tertentu.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan menetralsir kesalahan pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mendefenisikan konsep-konsep sebagai berikut:

## 1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” (Soerjono Soekanto, 2002;243).

## 2. Otonomi Daerah

Oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang serta Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

## 3. Otonomi Desa

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang di selenggarakan oleh pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dengan PP No. 38 Tahun 2007 tersebut urusan Pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sangat jelas dan rinci. Dalam memperkuat Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

tentang Tatacara penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

#### 5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 pasal 1 ayat 8 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Badan permusyawaratan desa adalah sebutan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Hal ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 tentang pemilihan anggota BPD yang berbunyi” Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD”.

### **2.8. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini konsep operasionalnya terdiri dari satu variable. Adapun variabelnya adalah yaitu “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

**Lihat tabel II.1 berikut:**

NO	Variabel	Indikator
1.	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 1 Tahun 2009	a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

## 2.9. Teknik Pengukuran

Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variable atau indikator dalam tiga tingkatan atau variasi. Adapun penilaian tersebut adalah : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Adapun teknik yang digunakan dalam variable penelitian adalah sebagai berikut :

**Sangat Baik** : Jika rata-rata (persentase) penilaian  $\geq 80-100$  terhadap sub indikator.

**Baik** : Jika rata-rata (persentase) penilaian responden terhadap indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori  $\geq 70-79\%$

**Cukup Baik** : Jika rata-rata (persentase) penilaian responden seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori  $\leq 60-69\%$

**Kurang Baik** : Jika rata-rata (persentase) penilaian responden terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori  $\leq 0-59\%$

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Sangat baik : Apabila sebagian responden menyatakan sangat baik

Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan baik.

Cukup Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan cukup baik.

Kurang Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan tidak baik.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sangat baik : Apabila sebagian responden menyatakan sangat baik

Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan baik.

Cukup Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan cukup baik.

Kurang Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan tidak baik.

3. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sangat baik : Apabila sebagian responden menyatakan sangat baik

Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan baik.

Cukup Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan cukup baik.

Kurang Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan tidak baik.

4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

Sangat baik : Apabila sebagian responden menyatakan sangat baik

Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan baik.

Cukup Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan cukup baik.

Kurang Baik : Apabila sebagian besar responden menyatakan tidak baik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan Melakukan penelitian ini dapat diketahui tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

#### **3.2. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini penulis akan lakukan sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya terhitung dari bulan Oktober sampai Desember. Dimana Penelitian dilakukan Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer.

Data yang penulis kumpulkan langsung dari responden, dalam penelitian ini penulis mengambil data dalam bentuk pendapat responden dengan cara wawancara terstruktur dan dalam pengamatan langsung tentang pengaruh peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa.



Data Sekunder.

Data yang berasal dari laporan-laporan maupun literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus penelitian. Menurut **Nanang Martono (2010 : 66)** Populasi adalah “keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

**Lihat Tabel III.1.**

No	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Anggota BPD	5 Orang	100%
2	Kepala Desa	1 Orang	100%
3	Sekretaris Desa	1 Orang	100%
4	Kepala Dusun	3 Orang	100%
5	Tokoh Masyarakat	4 Orang	100%
6	Ketua Pemuda	1 Orang	100%
<b>Jumlah</b>		<b>15 Orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean 2012*

Sedangkan sample adalah merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sample dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Serta penulis menggunakan sample jenuh (**Nanang Martono: 2010 : 70**) merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai sample, teknik ini disebut juga metode

sensus untuk pemerintahan desa. Apabila besarnya populasi kurang dari 100 untuk mendapatkan data yang representatif maka seluruh populasi hendaknya di jadikan sample pada penelitian ini. Dan tujuan mengambil sample ialah memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan mengamati keseluruhan dari populasi.

Selain Alasan mengapa mereka dipilih sebagai populasi sekaligus sampel karena mereka merupakan perangkat desa yang mewakili masyarakat pada umumnya.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan pengamatan lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk melihat keadaan secara nyata.

#### **2. Wawancara (*Interview*)**

Dalam wawancara percakapan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang berfungsi sebagai pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan yang diwawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Demikian dapat diketahui bahwa wawancara adalah kegiatan seorang peneliti dalam mengambil data dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai instrument untuk mendapatkan informasi.

### 3. Quesioner (angket)

Quesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden mengenai bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pulau Tengah.

### **3.6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dikualitatifkan menurut jenis, kemudian penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, tabel dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang kemudian diambil suatu kesimpulan, sehingga dapat diketahui gambaran tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

#### **4.1. Keadaan Umum**

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Pulau Tengah, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis, keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Pulau Tengah merupakan salah satu dari empat belas (14) desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki penduduk dari berbagai etnis antara lain ; etnis Melayu, Bugis, Jawa. Desa Pulau Tengah secara administratif terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III dengan luas wilayah 15 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah desa Pulau Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasar Baru
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Kumpai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Pauh
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Angit

Desa Pulau Tengah sebagian besar adalah wilayah dataran dan selebihnya adalah persawahan. Iklim di Desa Pulau Tengah sebagaimana iklim di desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan hujan, namun musim hujan lebih dominan daripada musim kemarau.

Jarak dari desa Pulau Tengah menuju ke Ibu Kota Kecamatan yaitu 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit, jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Taluk Kuantan) yaitu 25 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit.

## 2. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk desa pulau tengah pada tahun sebelumnya adalah sebanyak 480 jiwa dan jumlah penduduk di Desa Pulau Tengah sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 581 jiwa dengan 258 KK. Adapun jumlah penduduk dari tiga dusun yang ada di desa Pulau Tengah dapat dilihat dalam tabel IV.I sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Penduduk Desa Pulau Tengah**

<b>Lingkungan</b>	<b>Laki-laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (jiwa)</b>	<b>Jumlah (jiwa)</b>	<b>Jumlah (KK)</b>
Dusun I	115	120	235	119
Dusun II	123	173	296	123
Dusun III	15	35	50	16
<b>Jumlah</b>	<b>253</b>	<b>328</b>	<b>581</b>	<b>258</b>

*Sumber data: profil Desa Pulau Tengah Tahun 2012*

Penduduk desa Pulau Tengah mayoritas memeluk agama islam yaitu sebanyak 100%.Corak kehidupan masyarakat di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan suatu “*gemeinschaft*” yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dimengerti karena penduduk desa merupakan “*face to face group*” dimana mereka saling mengenal betul seolah-olah mengenal diri sendiri”. (Wasistiono,2006:11). Walaupun terdapat perbedaan diantara mereka namun itu tidak menjadikan mereka berbeda baik dari segi Suku, Pendidikan maupun Ekonomi.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa Pulau Tengah beraneka ragam, dimana mata pencaharian penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, dan hanya sebagian kecil menekuni bidang bisnis jual beli dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan desa Pulau Tengah adalah desa yang letaknya di daerah dataran rendah yang tidak terlalu luas. Maka pencaharian penduduk secara umum dapat dilihat pada tabel IV.2

**Tabel IV.2**  
**Mata Pencaharian**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Petani	57
Peternak	10
Wiraswasta	6
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3
Karyawan	24
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Profil desa Pulau Tengah tahun 2012*

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pendapatan penduduk di bidang pertanian di Desa Pulau Tengah 65% berasal dari produksi pertanian yaitu Padi. Sebanyak 35% pendapatan penduduk berasal dari perkebunan.

Hasil produksi tersebut juga merupakan pendapatan asli desa yang terhitung dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang perhitungannya dibagi berdasarkan harga jual hasil produksi. Dalam hal ini, 5% dari harga satuan penjualan hasil produksi terhitung sebagai pemasukan untuk desa. Untuk hasil produksi padi, harga satuan berkisar Rp 7000/kg, untuk hasil produksi karet, harga satuan berkisar Rp 10000/kg.

Besarnya persentase pemasukan untuk desa yang diambil dari hasil produksi pertanian tersebut ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa Pulau Tengah dan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Selanjutnya diperlihatkan gambaran hasil produksi pertanian masyarakat pada tabel IV.3

**Tabel IV.III**  
**Gambaran Hasil Produksi Pertanian**

<b>Hasil Produksi</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Padi	65
Karet	35
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Profil Desa Pulau Tengah Tahun 2012*

Tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Pulau Tengah cukup baik disebabkan oleh kondisi wilayah yang berada di Kecamatan Pangean. Berikut adalah data tingkat kesejahteraan masyarakat desa Pulau Tengah pada tabel IV.4

**Tabel IV.4**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

<b>Tingkat Kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Jumlah (KK)</b>
Masyarakat Pra sejahtera	54
Masyarakat sejahtera	138
<b>Jumlah</b>	<b>192</b>

*Sumber data: Profil Desa Pulau Tengah Tahun 2012*

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pula diantara masyarakat yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat setempat pada umumnya hanya sampai pada tingkat SLTP dan SMU. Sedangkan sarana pendidikan yang tersedia di desa Pulau Tengah hanya taman kanak-kanak dan sekolah dasar negeri.

**Tabel IV.5**  
**Sarana Pendidikan**

<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah (unit)</b>
Taman Kanak-Kanak (TK)	1
Sekolah Dasar	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

*Sumber data: Profil Desa Pulau Tengah Tahun 2012*



#### **4.2. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pulau Tengah**

##### **Visi Misi Desa Pulau Tengah**

##### **1. Visi**

1. Terwujudnya Masyarakat Pulau Tengah yang maju sejahtera dan religius

##### **2. Misi**

- a. Tersedianya prasarana dan sarana (saprass) umum yang memadai
- b. Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah
- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara
- d. Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat dan ramah lingkungan
- e. Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya dan olahraga
- f. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- g. Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efektif, efisien, demokratis.

Desa Pulau Tengah dibentuk pada tahun 1960an yang merupakan pemekaran dari desa pasar baru yang dulu bergabung dengan kecamatan Baserah Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu pejabat yang diangkat menahkodai desa Pulau Tengah adalah sebagai berikut: Bapak Daud, Bapak Lasin, Bapak Beram Tahun, Bapak Pokia Barit Tahun, Bapak Nurdin Yus.

Pada tahun 1992-2006 diadakan pemilihan kepala desa yang baru dan dimenangkan oleh Bapak Rustam R. Pemilihan selanjutnya pada tahun 2008-2014 dimenangkan oleh Bapak Suhaidiman yang masih menjabat sampai saat ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selanjutnya dalam pembahasan ini akan dibahas secara terpisah mengenai keadaan Pemerintah Desa dan keadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### 1. Pemerintah Desa

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

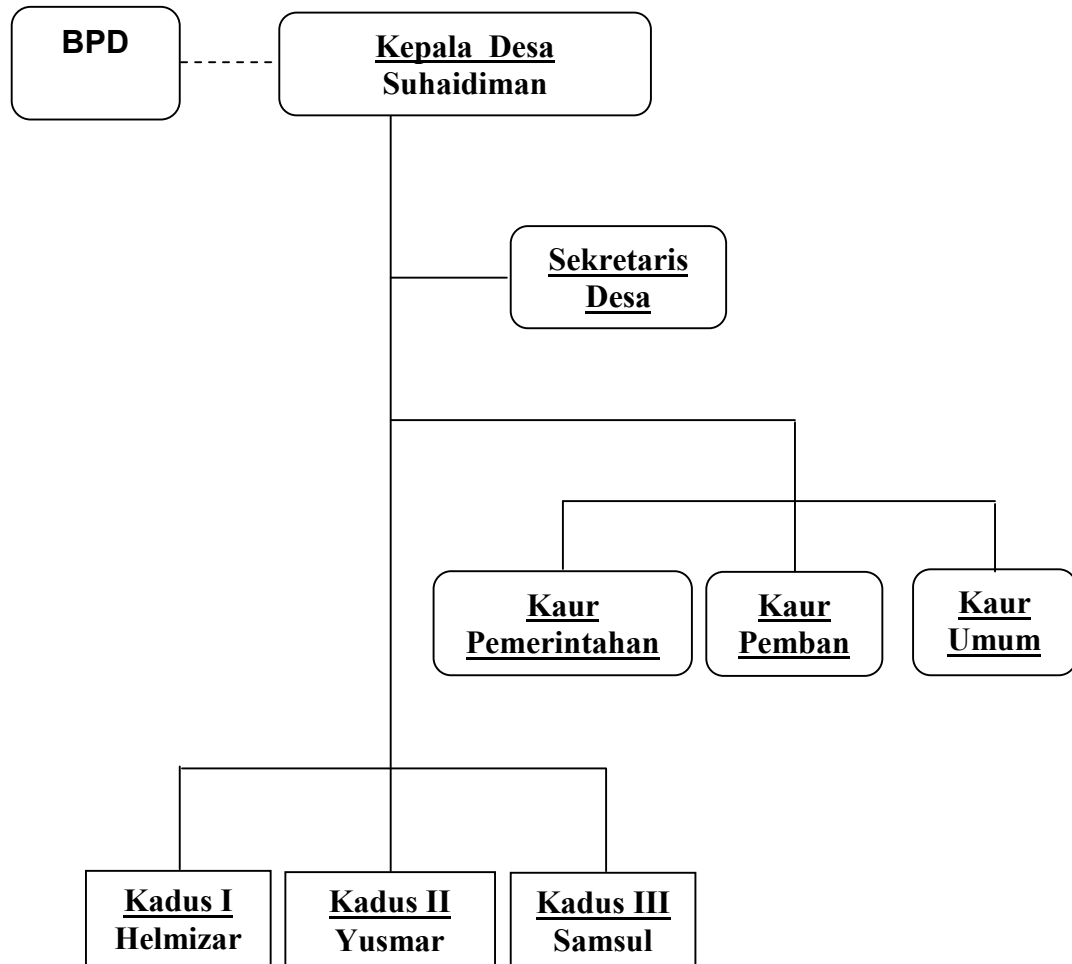
- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Pulau Tengah terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Kaur Pembangunan
5. Kaur Umum
6. Kadus I
7. Kadus II
8. Kadus III

Struktur pemerintah Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean  
Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dalam Gambar IV.1

**Gambar IV.1.**



Keterangan :   Garis komando : —————  
                  Garis koordinasi : - - - - -

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulau Tengah

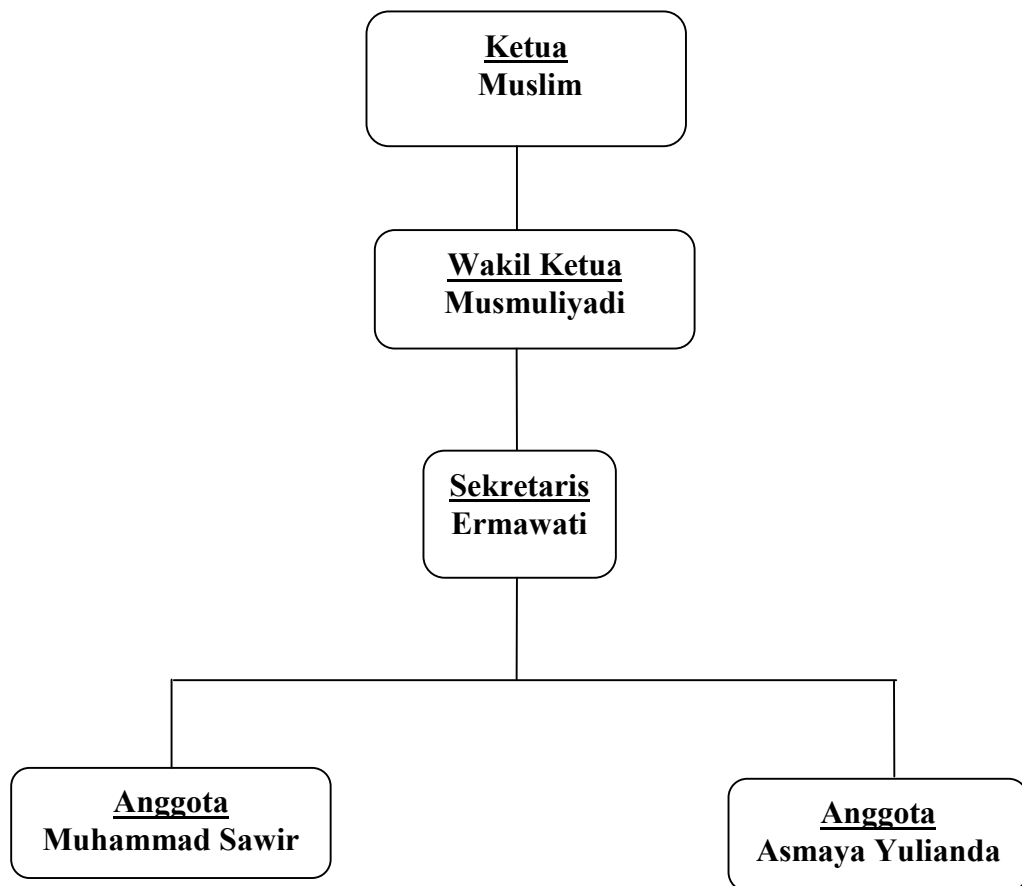
Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh

BPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di desa Pulau Tengah sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas.

1. Ketua BPD : 1 Orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 Orang
3. Sekretaris BPD : 1 Orang
4. Anggota : 2 Orang

Adapun struktur pengurus BPD Desa Pulau Tengah dapat dilihat dalam Gambar IV.2

**Gambar IV.2**



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Bab ini menguraikan tentang karakteristik responden, tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah.

#### **5.1 Karakteristik Responden**

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah *jenuh*, maka pemilihan sampel telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi tempat tinggal, umur, pendidikan, maupun pekerjaan.

##### **1. Alamat Tempat Tinggal, Usia, Jenis Kelamin dan Tempat Lahir Responden**

Berdasarkan distribusi data hasil penelitian, diperoleh tempat tinggal (alamat dusun) responden masyarakat yang bervariasi. Responden yang tinggal di dusun I sebanyak 6 orang atau 40%, responden yang tinggal di dusun II sebanyak 5 orang atau 33,33% dan responden yang tinggal di dusun III sebanyak 4 orang atau 26,67%. Berikut diperlihatkan pada Tabel V.1.

**Tabel V.1**  
**Distribusi Responden berdasarkan Alamat Tempat Tinggal**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Dusun I	6	40
Dusun II	5	33,33
Dusun III	4	26,67
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Hasil olahan Penelitian, Tahun 2012*

Berdasarkan distribusi data dari hasil penelitian ini diperoleh usia responden masyarakat yang mendominasi adalah usia antara 41-50 tahun dengan persentase 33,33% atau sebanyak 5 orang responden, sedangkan usia responden 50-60 tahun ada 4 orang atau 26,67% yang paling sedikit adalah usia  $\leq 40$  tahun dan diatas 60 tahun masing-masing yaitu 3 orang atau 20%. (Tabel V.2).

**Tabel V.2**  
**Distribusi Responden Menurut Usia**

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
$\leq 40$ tahun	3	20
41-50 tahun	5	33,33
51-60 tahun	4	26,67
$\geq 61$ tahun	3	20
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data : Hasil olahan penelitian, Tahun 2012*

Usia dengan frekuensi 41-50 tahun yang paling banyak di lokasi penelitian, hal ini dikarenakan responden yang dipilih merupakan masyarakat yang dianggap paling memahami tentang kondisi desa yang diteliti dan dari data tersebut terlihat bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup variatif dari segi umur. Berdasarkan jenis kelamin dari seluruh responden masyarakat, responden laki-laki sebanyak 13 orang atau 86,67%



sedangkan perempuan sebanyak 2 orang atau 13,33% (Tabel V.3) atau kurang dari setengah jumlah responden laki-laki. Penelitian ini lebih didominasi oleh responden laki-laki karena masyarakat yang dipilih hanya sebagian saja yang berasal dari perempuan.

**Tabel V.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis kelamin</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-Laki	13	86,67
Perempuan	2	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data : Hasil olahan penelitian, Tahun 2012*

Sedangkan tempat lahir responden pada table V.4

**Tabel V.4**  
**Distribusi Responden Masyarakat Berdasarkan Tempat Lahir**

<b>Tempat lahir</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pulau Tengah Pangean	9	60
Luar Tengah Pangean	6	40
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data : Hasil olahan penelitian, Tahun 2012*

Berdasarkan tempat kelahiran responden masyarakat pada tabel V.4 terlihat bahwa 9 orang atau 60% dari keseluruhan responden lahir di Desa Pulau Tengah Pangean dalam hal ini sebagian besar lahir di dusun I, sementara yang lahir diluar Luar Desa Pulau Tengah Pangean berjumlah 6 orang atau 40%, hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah responden yang terbanyak adalah yang lahir di Desa Pulau Tengah Pangean dan mayoritas penghuninya lahir di daerah Dusun I Kab Kuantan Singingi.

Sehubungan dengan rasio ini kiranya tidak berlebihan jika penulis menyimpulkan bahwa jumlah responden yang terpilih cukup baik, jika

menilik sebuah teori yang kurang lebih berbunyi bahwa sebuah daerah akan mengalami sebuah proses yang dinamis dalam hal kemajuan dan pembangunan di daerahnya jika daerah tersebut masih dihuni oleh  $\geq 75\%$  penduduk asli. (Anonim, 1990:37).

## 2. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Utama Responden

**Tabel V.5**  
**Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
SD	4	26,67
SMP	3	20
SMU	7	46,67
Universitas/ Perguruan tinggi	1	6,67
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan penelitian, Tahun 2012*

Pada tabel V.5 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan responden masyarakat. Dari keseluruhan responden, yang paling banyak adalah responden yang berpendidikan SMU yang berjumlah 7 orang atau 46,67%, dan yang paling kecil jumlahnya yaitu yang berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 1 orang atau 6,67%, sementara itu yang berpendidikan SMP sebanyak 3 orang atau 20%, SD sebanyak 4 orang atau 26,67%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan unsur penyelenggara pemerintahan desa sudah tergolong tinggi. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang menjabat dalam pemerintahan desa sudah tergolong orang yang memiliki pendidikan tinggi sehingga mampu memahami persoalan yang ada di masyarakat dan mampu menjalankan tugas yang diberikan.

Berikutnya adalah distribusi responden menurut pekerjaan utama yang ditunjukkan dalam tabel V.6 Berdasarkan tabel V.6 terlihat bahwa pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang paling banyak yang dimiliki oleh keseluruhan responden yaitu petani yaitu sebanyak 12 orang atau 80%, selanjutnya yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 1 orang atau 6,67%, pedagang/wiraswasta sebanyak 2 orang atau 13,33%.

**Tabel V.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan utama</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Petani	12	80
PNS	1	6,67
Pedagang/ Wiraswasta	2	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

## **5.2 Distribusi jawaban responden terhadap pertanyaan Peranan Badan Permasyarakatan Desa (Variable X) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Otonomi Daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang hakikatnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat semakin lama harus semakin baik, disamping itu untuk memberikan peluang serta peran masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam hal demokrasi.

Dalam mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perkembangan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional yang secara langsung akan berpengaruh.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mewujudkan demokrasi ditingkat desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa harus bersifat independen, untuk mewujudkan lembaga demokrasi independen ditingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang profesional dan membantu kelancaran program-program pemerintah desa dan melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga legislasi ditingkat desa.

Dalam penelitian ini penulis tidak menyimpang dari indikator-indikator daripada peranan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dari indikator itulah penulis dapat memberikan pertanyaan yang berbentuk kuesioner. Berikut ini disajikan data dari jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa Pulau Tengah Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 1. Legislasi

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama

dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
2. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
3. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
5. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.7: Distribusi jawaban Responden tentang BPD sudah pernah menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	2	13,33
2	Belum	12	80
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.7 diatas, diketahui Sebanyak 2 orang atau 13,33% responden menjawab bahwa BPD sudah pernah menetapkan peraturan desa bersama-sama Kepala Desa, sebanyak 12 orang atau 80% responden mengatakan bahwa belum pernah, Adapun responden yang menjawab kurang tahu yaitu sebanyak 1 orang atau 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 80%. Alasan mengapa belum karena anggota BPD tersebut tidak pernah ikut dalam rapat yang dilaksanakan di masyarakat, jika ikut itupun hanya ketua BPD yang menghadiri rapat.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua BPD Desa Pulau Tengah Bapak Muslim yang menyatakan bahwa kami Belum pernah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa jika melakukan pertemuan-pertemuan dengan para perangkat desa dan tokoh masyarakat hanya ketua BPD saja yang datang sedangkan anggota yang lain tidak datang dengan berbagai alasan(wawancara 10 Desember, 2012).

**Tabel V.8 : Distribusi jawaban menurut responden BPD sudah membuat rancangan peraturan desa dan mengajukannya kepada kepala desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	13	86,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.8 diatas, diketahui bahwa sebanyak 1 orang atau 6,67% responden mengatakan bahwa BPD sudah membuat rancangan peraturan desa dan mengajukannya kepada kepala desa, sebanyak 13 orang atau 86,67% responden menjawab belum, sedangkan yang menjawab kurang tahu 1 orang atau 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah membuat rancangan peraturan desa dan mengajukannya kepada kepala desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 86,67%.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan bersama Kepala Desa Bapak Suhaidiman menyatakan bahwa BPD belum pernah membuat rancangan peraturan desa dan mengajukan nya kepada pemerintah desa hal ini karena peraturan desa yang lama masih ada sehingga tidak perlu membuat atau membahas peraturan yang baru(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.9: Distribusi Jawaban Responden tentang BPD pernah mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	3	20
2	Belum	11	73,33
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 3 orang atau 20% responden mengatakan bahwa BPD sudah pernah mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa, kemudian sebanyak 11 orang atau 73,33% responden menjawab belum pernah, sedangkan yang menjawab kurang tahu 1 orang atau 6,67% . Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 73,77% .

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan bersama Kepala Desa Bapak Suhaidiman menyatakan bahwa BPD belum mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa, kepada pemerintah desa(wawancara, 10 Desember 2012).



**Tabel V.10: Jawaban Responden tentang BPD pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat sering	1	6,67
2	sering	1	6,67
3	Jarang	5	33,33
4	Tidak pernah	8	53,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.10 diatas, diketahui Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sangat sering melakukan sosialisai, 1 orang atau 6,67% menjawab sering melakukan sosialisasi, sebanyak 5 orang atau 33,33% responden jarang melakukan sosialisasi, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 8 orang atau 53,33%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 53,33% .

Hal ini juga di pastikan dengan melakukan wawancara dengan kepala dusun III Bapak Syamsul yang mengatakan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat dibalai desa, tetapi yang datang hanya ketua BPD saja sedangkan anggotanya tidak pernah datang, bahkan dalam gotong royong di masyarakat hanya sedikit yang ikut berpartisipasi.BPD sekarang katanya hanya menerima apa yang

dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melakukan tindakan apapun(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.11: Jawaban Responden tentang peraturan yang dibahas oleh BPD dengan kepala desa sesuai dengan keinginan masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	0	0
2	Sesuai	3	20
3	Kurang Sesuai	10	66,67
4	Tidak sesuai	2	13,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.14 diatas, diketahui Sebanyak 3 orang atau 20% responden menjawab peraturan yang dibahas sesuai dengan keinginan masyarakat, 10 orang atau 66,67% responden menjawab peraturan yang dibahas kurang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan 2 orang responden menjawab tidak sesuai atau 13,33%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa peraturan yang dibahas oleh BPD dengan kepala desa kurang sesuai dengan keinginan masyarakat, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .

Hal ini dengan melakukan wawancara dengan kepala desa Bapak Suhaidiman yang mengatakan bahwa peraturan yang ada saat ini di masyarakat yaitu peraturan yang lama yang berdasarkan adat istiadat belum ada perubahan jika ada perubahan masyarakat belum tentu mau menerima perubahan tersebut, sehingga sulit untuk menerapkan peraturan yang baru sebagian ada yang komplek atau mempersalahkannya (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.12: Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Legislasi**

<b>Indikator pertanyaan</b>	<b>S</b>		<b>B</b>		<b>KT</b>		<b>TT</b>		<b>Total</b>
	<b>Frek</b>	<b>%</b>	<b>Frek</b>	<b>%</b>	<b>Frek</b>	<b>%</b>	<b>Frek</b>	<b>%</b>	
1. Menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa	<b>2</b>	<b>13,33</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
2. Sudah membuat rancangan peraturan desa dan mengajukannya kepada kepala desa	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>13</b>	<b>86,67</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
3. Mengajukan perubahan terhadap setiap rencana peraturan desa	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>73,33</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>5</b>	<b>33,33</b>	<b>8</b>	<b>53,33</b>	<b>15</b>
5. Peraturan yang dibahas oleh BPD dengan kepala desa sesuai dengan keinginan masyarakat	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>66,67</b>	<b>2</b>	<b>13,33</b>	<b>15</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>9.33</b>	<b>40</b>	<b>53,33</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>13,33</b>	<b>75</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tabel V.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa belum dilaksanakan dengan baik dan juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya persentase yang di dapat yaitu 53,33% menjawab belum, selain itu membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di Desa Pulau Tengah belum ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

Hal senada juga dikatakan oleh perangkat desa dan beberapa masyarakat yang penulis wawancarai dimana masyarakat masih takut untuk menyampaikan saran kepada pemerintah desa, sebagian masyarakat mengakui masih takut jika menyampaikan saran-saran kepada pemerintah lewat BPD sehingga menyebabkan tidak berjalannya pemerintahan sebagaimana mestinya(wawancara, 10 Desember 2012).

## 2. Pengawasan

Di dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Antara perencanaan yang dibuat oleh BPD, Baik dalam bentuk

peraturan, program pembangunan dan lainnya tidak terlepas dari pengawasan, hal ini bertujuan sebagai proses pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sebagai berikut:

**Tabel V.13: Jawaban Responden dalam pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan lainnya**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	3	20
2	Baik	0	0
3	Cukup Baik	1	6,67
4	Kurang Baik	11	73,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.14 diatas, diketahui Sebanyak 3 orang atau 20% responden menjawab sangat baik, sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab cukup baik, dan 11 orang responden menjawab kurang baik atau 73,33%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan lainnya masih kurang baik, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab kurang baik sebanyak 73,77% .

Dalam wawancara dengan kepala dusun III Bapak Syamsul yang mengatakan bahwa pengawasan yang ada saat ini masyarakat ada yang komplek atau memperlengkapannya karena BPD saat ini hanya mengikuti apa kata dari perangkat desa tanpa berkonsultasi dulu sesama anggota BPD itu sendiri(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.14: Jawaban Responden dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Pernah	0	40
2	Jarang	13	86,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	1	6,67
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.14 diatas, diketahui Sebanyak 13 orang atau 86,67% responden menjawab jarang, sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab kurang tahu, dan 1 orang responden menjawab tidak tahu atau 73,33%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD masih jarang dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab jarang sebanyak 86,67% .

Dalam wawancara dengan salah seorang kades pulau tengah Bapak Syamsul yang mengatakan bahwa pengawasan yang ada saat ini dalam penggunaan APBDes sering bermasalah dimana masyarakat sering komplek atau memperlengkapannya kemana anggaran itu digunakan, jika ada anggaran pembangunan didesa yang dilaksanakan BPD tidak pernah mengawasi nya, sehingga rawan untuk di ambil oleh oknum tak bertanggung jawab (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.15: Jawaban Responden dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	11	73,33
3	Kurang Tahu	3	20
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.15 diatas, diketahui Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sudah, sebanyak 11 orang atau 73,33% responden menjawab belum, dan 3 orang responden menjawab kurang tahu atau 20%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 73,77% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap pemerintahan desa belum berjalan dengan maksimal(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.16: Jawaban Responden dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	14	93,33
3	Kurang Tahu	0	0
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.16 diatas, diketahui Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sudah, sebanyak 14 orang atau 93,33% responden menjawab belum. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 93,33% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa belum dilaksanakan dengan baik dimana tidak adanya koordinasi antara sesama anggota BPD (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.17: Jawaban Responden dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	2	13,33
2	Belum	10	66,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	2	13,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel V.17 diatas, diketahui Sebanyak 2 orang atau 13,33% responden menjawab sudah, sebanyak 10 orang atau 66,67% responden menjawab belum, dan 1 orang responden menjawab kurang tahu atau 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .



Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap pemerintahan desa belum berjalan dengan maksimal(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.18: Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pengawasan**

Indikator pertanyaan	S		B		KT		TT		Total
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1. Peran BPD dalam pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan lainnya	3	20	0	0	1	6,67	11	73,33	15
2. Pengawasan terhadap penggunaan APBDes	0	0	13	86,67	1	6,67	1	6,67	15
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa	1	6,67	11	73,33	3	20	0	0	15
4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa	1	6,67	14	93,33	0	0	0	0	15
5. Menjalankan fungsinya dalam hal pengawasan sesuai aturan	2	13,33	10	66,67	1	6,67	2	13,33	15
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>9,33</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>18,66</b>	<b>75</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisioner, 2012*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tabel V.18 diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Antara perencanaan yang dibuat oleh BPD, Baik dalam bentuk peraturan, program pembangunan dan lainnya belum terlaksana dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase yang didapat yaitu 64% responden menjawab belum. Selain itu membuktikan bahwa anggota BPD yang ada di Desa Pulau Tengah tidak ikut berpartisipasi secara menyeluruh dalam rangka kemajuan desa ini.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang mengakui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa belum dilaksanakan dengan baik dimana tidak adanya koordinasi antara sesama anggota BPD, selain itu anggota BPD itu sendiri hampir tidak pernah mengikuti rapat dengan masyarakat (wawancara, 10 Desember 2012).

### 3. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Masyarakat desa Pulau Tengah merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

**Tabel V.19: Jawaban Responden dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	13	86,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Tabel V.19 Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sudah, sebanyak 13 orang atau 86,67% responden menjawab belum, dan 1 orang responden menjawab kurang tahu atau 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum pernah, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 86,67% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa dalam menampung menggali, menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat BPD belum melaksanakan secara maksimal tapi ini semua karena tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan antar anggota BPD (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.20: Jawaban Responden dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	10	66,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	3	20
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada tabel V.20 diatas, diketahui Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sudah, sebanyak 10 orang atau 66,67% responden menjawab belum, 1 orang responden menjawab kurang baik atau 6,67%, dan 3 orang responden menjawab tidak tahu atau 20%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa belum pernah, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada seorang Kadus mengatakan bahwa BPD saat ini tidak bekerja secara maksimal dimana hanya perangkat desa yang mengusulkan segala pembangunan yang di sampaikan oleh masyarakat bahkan dalam pelaksanaan kami juga mengawasinya apakah dilaksanakan pemerintah atau tidak BPD hanya ikut dengan segala usulan yang dilakukan oleh pemerintah desa(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.21: Jawaban Responden dalam turun langsung menjumpai masyarakat untuk menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Pernah	0	0
2	Belum	14	93,33
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada tabel V.21 diatas, diketahui Sebanyak 14 orang atau 93,33% responden menjawab belum, dan 1 orang responden menjawab kurang tahu atau 6,67%. Dari hasil jawaban

diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam turun langsung menjumpai masyarakat untuk menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum pernah, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 93,33% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa BPD memang jarang sekali turun secara langsung karena terkendala situasi dan kondisi tetapi kami berusaha untuk kedepan bisa melakukan turun langsung (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.22: Jawaban Responden dalam menyikapi aspirasi masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Pernah	2	13,33
2	Belum	13	86,67
3	Kurang Tahu	0	0
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada tabel V.22 diatas, diketahui Sebanyak 2 orang atau 13,33% responden menjawab pernah, dan 13 orang responden menjawab kurang tahu atau 86,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa dalam menyikapi aspirasi masyarakat BPD belum pernah menyikapinya dengan, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 86,67% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengatakan bahwa BPD belum menyikapi aspirasi masyarakat ini karena kurang nya komunikasi dengan masyarakat maupun dengan anggota BPD yang lainnnya (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.23: Jawaban Responden dalam menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Pernah	0	0
2	Belum	14	93,33
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada tabel V.23 diatas, diketahui Sebanyak 14 orang atau 93,33% responden menjawab belum, dan 1 orang responden menjawab kurang ahu 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD dalam menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat belum pernah, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 93,33% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang aparatur desa sendiri mengatakan bahwa BPD belum pernah menetapkan program yang mementingkan aspirasi masyarakat sepertinya antara ketua BPD dan anggota BPD tidak berjalannya komunikasi yang baik sehingga tidak berjalan nya tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.24: Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.**

Indikator pertanyaan	S		B		KT		TT		Total
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1. Menampung aspirasi masyarakat?	1	6,67	13	86,67	1	6,67	0	0	15
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat ke kepala desa	1	6,67	10	66,67	1	6,67	3	20	15
3. Turun langsung untuk,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	0	0	14	93,33	1	6,67	0	0	15
4. Menyikapi aspirasi masyarakat	2	13,33	13	86,67	0	0	0	0	15
5. Menetapkan peraturan dan program pembangunan desa sesuai dengan yang diaspirasikan atau diinginkan oleh masyarakat	0	0	14	93,33	1	6,67	0	0	15
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>5,33</b>	<b>64</b>	<b>85,33</b>	<b>4</b>	<b>5,33</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>75</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tabel V.24 diatas, dapat disimpulkan bahwa menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sangat besar apalagi setelah melakukan turun lapangan penulis menemukan berbagai proyek pembangunan yang dulunya merupakan usulan-usulam dari masyarakat pulau tengah itu sendiri yang hingga sekarang dapat dinikmati seperti jalan, sanitasi dan proyek-proyek lainnya. Ini semua tidak lepas dari campur tangan masyarakat dalam pembangunan desa pulau tengah, yang tak putus asa dalam menyampaikan aspirasi nya walaupun sebagian masyarakat belum mengerti mekanisme penyampaian aspirasi tersebut. Disini peran BPD

juga terlihat kurang berjalan sebagaimana mestinya ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini dibuktikan dengan persentase yaitu 85,33% responden menjawab belum terlaksana sebagai mana mestinya.

Hal senada juga dikatakan oleh perangkat desa dan beberapa masyarakat yang penulis wawancarai dimana BPD tidak pernah melakukan tugasnya seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik sehingga menyebabkan tidak berjalannya pemerintahan sebagaimana mestinya (wawancara, 10 Desember 2012).

4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.

Memberikan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut kepentingan desa merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh BPD karena jika tidak, maka besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu BPD harus berperan aktif dalam kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa, berikut adalah tanggapan responden terhadap kerja sama yang dilakukan di desa pulau tengah kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

**Tabel V.25: Jawaban Responden dalam peran memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama Desa**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	13,33
2	Baik	3	20
3	Cukup Baik	0	0
4	Kurang Baik	10	66,67
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*



Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.25 diatas, diketahui Sebanyak 2 orang atau 13,33% responden menjawab sangat baik, sebanyak 3 orang atau 20% responden menjawab baik, dan 10 orang responden menjawab kurang baik atau 66,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD kurang baik dalam peran memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama Desa masih kurang baik, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .

Dalam wawancara dengan kepala desa Bapak Suhaidiman yang mengatakan bahwa peran BPD yang ada saat ini masyarakat sering komplek atau memperlmasalahkannya dimana yang sering memberikan pertimbangan-pertimbangan adalah tokoh masyarakat(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.26: Jawaban Responden dalam terlibat secara langsung dalam kerjasama desa**

<b>N o</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekuensi (f)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pernah	0	0
2	Jarang	13	86,67
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	1	6.67
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.26 diatas, diketahui bahwa Sebanyak 13 orang atau 86,67% responden menjawab jarang, sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab kurang tahu, dan 1 orang responden menjawab tidak tahu atau 6,67%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD jarang terlibat secara langsung dalam kerjasama desa,

ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 73,77% .

Dalam wawancara dengan kepala desa Bapak Suhaidiman yang mengatakan bahwa terkadang ada yang tidak terlibat langsung dalam kerjasama desa karena perbedaan pendapat namun itu semua tidak menyebabkan perpecahan bagi BPD(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.27: Jawaban Responden dalam perjanjian kerjasama desa sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	1	6,67
2	Belum	11	73,33
3	Kurang Tahu	1	6,67
4	Tidak Tahu	2	13,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.27 diatas, diketahui bahwa Sebanyak 1 orang atau 6,67% responden menjawab sudah, sebanyak 11 orang atau 73,33% responden menjawab belum, 1 orang atau 6,67% responden menjawab kurang tahu, dan 2 orang responden menjawab tidak tahu atau 13,33%. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam memberikan pertimbangan kerja sama desa, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 73,77%

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa terkadang aspirasi yang masuk tidak terealisasi karena banyak nya aspirasi yang disampaikan masyarakat, namun kami

berusaha untuk mempertimbangkan aspirasi tersebut demi kemajuan desa(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.28: Jawaban Responden dalam mensosialisasikan bentuk kerjasama yang disetujuinya tersebut**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	0	0
2	Belum	3	20
3	Kurang Tahu	10	66,67
4	Tidak Tahu	2	13,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi jawaban responden pada tabel V.28 diatas, diketahui bahwa Sebanyak 3 orang atau 20% responden menjawab sudah, sebanyak 10 orang atau 66,67% responden menjawab belum, dan 2 orang atau 13,33% responden menjawab kurang tahu. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum pernah mensosialisasikan bentuk kerjasama yang disetujuinya tersebut, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa sama sekali belum ada yang kami sosialisasikan kepada masyarakat(wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.29: Jawaban Responden dalam melakukan evaluasi terhadap kerjasama tersebut**

No	Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sudah	2	13,33
2	Belum	10	66,67
3	Kurang Tahu	3	20
4	Tidak Tahu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari distribusi responden pada tabel V.29 diatas, diketahui bahwa Sebanyak 2 orang atau 13,33% responden menjawab sudah, sebanyak 10 orang atau 66,67% responden menjawab belum, dan 3 orang atau 20% responden menjawab kurang tahu. Dari hasil jawaban diatas dapat diketahui bahwa BPD belum melakukan evaluasi terhadap kerjasama tersebut, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 66,67% .

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua BPD Bapak Muslim sendiri mengakui bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap kerjasama desa belum kami lakukan secara maksimal dimana setiap kali kepala desa melakukan kerjasama dengan perusahaan kami akan melakukan evaluasi dari dampak kerja sama yang akan dilakukan bagi masyarakat (wawancara, 10 Desember 2012).

**Tabel V.30: Rekapitulasi Jawaban Responden dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan Desa.**

Indikator Pertanyaan	S		B		KT		TT		Total
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	
1. Peran BPD dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama Desa	2	13,33	3	20	0	0	10	66,67	15
2. Terlibat secara langsung dalam kerjasama desa	0	0	13	86,67	1	6,67	1	6,67	15
3. Perjanjian kerjasama desa sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat	1	6,67	11	73,33	1	6,67	2	13,33	15
4. Mensosialisasikan bentuk kerjasama yang disetujuinya	0	0	3	20	10	66,67	2	13,33	15
5. Melakukan evaluasi terhadap kerjasama	2	13,33	10	66,67	3	20	0	0	15
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>6,66</b>	<b>40</b>	<b>53,33</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>18,66</b>	<b>75</b>

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tabel V.30 diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang diberikan BPD dalam kerja sama desa tidak cukup baik hal ini dibuktikan dengan masih tingginya persentase yaitu 53,33% responden menjawab belum terlaksana sebagaimana mestinya. Ini disebabkan karena jika pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak lain BPD hanya menyetujui saja, jika ada permasalahan pemerintah desa hanya berkonsultasi dengan perangkat desa lainnya.

Walaupun masih banyak terjadi kekurangan yang kami lakukan, masih banyak hal-hal yang belum terealisasi dalam kerja sama desa yang dilakukan oleh karena itu kami membutuhkan saran juga dari masyarakat

pulau tengah, demi tercapai nya masyarakat yang sejahtera kata Bapak muslim sebagai Ketua BPD desa pulau tengah pangean(wawancara, 6 Desember 2012).

**5.3. Tabel V.31: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan BPD di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

NO	Variabel Penelitian	S	B	KT	TT
1	Legislasi	7 (9,33%)	40 (53,33%)	18 (24%)	10 (13,33%)
2	Pengawasan	7 (9,33%)	48 (64%)	6 (8%)	14 (18,66%)
3	Menyalurkan Aspirasi	4 (5,33%)	64 (85,33%)	4 (5,33%)	3 (4%)
4	Pertimbangan Kerjasama Desa	5 (6,66%)	40 (53,33%)	15 (20%)	14 (18,66%)
Jumlah		23 (7,66%)	192 (64%)	43 (14,33%)	41 (13,66%)

*Sumber data: Hasil olahan Kuisisioner, 2012*

Dari rekapitulasi hasil tanggapan responden tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pulau Tengah diatas dapat dilihat bahwa:

1. Legislasi. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa legislasi belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dengan jumlah jawaban responden terbanyak yaitu 40 orang (53,33%), disini nampak terlihat bahwa BPD belum dapat melaksanakan tugasnya dalam bidang legislasi, namun disini penulis dapat mengetahuinya juga berdasarkan penuturan daripada kepala desa pulau tengah yang mana, peraturan yang lama masih bisa digunakan dan jika membuat peraturan yang baru sulit untuk diterapkan di masyarakat, karena masyarakat tidak bisa menerima peraturan tersebut. Pengawasan. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari jawaban responden terbanyak yakni 48 orang

(64%), dengan alasan bahwa BPD kurang berperan dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik. hal ini di karenakan responden menjawab terbanyak yakni 64 orang (85,33%), karena BPD tidak pernah menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karena itu selama ini yang sering mendengarkan aspirasi masyarakat adalah tokoh masyarakat. Sedangkan menurut masyarakat bahwa mereka tidak mengerti bagaimana mekanisme penyampaian aspirasi kepada BPD saja kami tidak begitu kenal bagaimana kami mau menyampaikan aspirasi
3. Pertimbangan mengenai kerja sama desa. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam memberikan pertimbangan kerjasama desa belum berjalan dengan baik hal ini didapatkan berdasarkan jawaban responden yakni 40 orang (53,33%), dengan alasan itulah BPD terus menerus diharapkan supaya bisa memberikan pertimbangan kepada kepala desa pulau tengah untuk selalu memperhatikan kerja sama yang akan datang. Jika tidak maka BPD hanya akan menjadi penonton yang tak melakukan tugas nya dengan baik.

Jadi akumulasi keseluruhan yaitu yang menjawab Sudah sebanyak 23 atau (7,66%), kemudian yang menjawab Belum sebanyak 192 atau (64%), kemudian yang menjawab Kurang Tahu sebanyak 43 atau (14,33%), dan yang menjawab

Tidak Tahu sebanyak 41 atau (13,66%). Jadi Peranan BPD di desa Pulau Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa peranan yang dijalankan BPD meliputi Legislasi, Pengawasan, Menghimpun dan Menyalurkan Aspirasi, dan memberikan pertimbangan kerjasama desa di desa Pulau Tengah belum terlaksana dengan baik, yang mana dikatakan terlaksana apabila peranan BPD berjalan baik yaitu legislasi, pengawasan, menghimpun dan menyalurkan aspirasi, dan serta memberikan pertimbangan kerja sama desa sesuai dengan keinginan masyarakat.

#### **5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permasyarakatan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai tanggapan responden unsur penyelenggara pemerintahan tentang kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan tupoksinya.

Berdasarkan informasi yang di dapat dilapangan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD yaitu minimnya fasilitas operasional BPD, masalah pemberian tunjangan/insentif, sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, dan minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan



pemerintahan di desa sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi BPD.

**a. Faktor intern dari BPD sebagai berikut:**

**1. Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa**

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Pulau Tengah adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

Tanggapan unsur penyelenggara pemerintahan desa tentang pernah tidaknya BPD berselisih paham dengan Kepala Desa. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa hubungan antara BPD dengan masyarakat dapat dikatakan harmonis, demikian halnya hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan walaupun tidak dipungkiri pernah terjadi selisih paham namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, karena apabila terjadi selisih paham maka akan dibahas bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur perangkat desa yang lainnya dalam forum-

forum yang diadakan oleh BPD. Terkadang Kepala Desa Pulau Tengah mendominasi dalam hal pemerintahan, hal ini disadari sepenuhnya oleh unsur penyelenggara pemerintahan sebab melihat tingkat pengetahuan dan SDM di desa ini masih rendah sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu namun hal tersebut tidak sampai menjadi konflik sebab kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa Pulau Tengah.

## 2. Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim yaitu dengan gaji sekitar 300.000/bulan. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan, kata beberapa anggota BPD (wawancara, 6 Desember 2012).

Pemberian insentif bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun insentif yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan. Untuk itu hal ini sudah kami rapatkan dengan pemerintah di tingkat kabupaten agar

sekiranya BPD mendapat perhatian dari pemerintah dengan cara misalnya insentif BPD ini dianggarkan sehingga mereka mampu fokus dengan tugas dan fungsi mereka.

### 3. Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD di Desa Pulau Tengah menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang dianggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Namun kenyataannya semua itu tidak berjalan sebagaimana harapan masyarakat.

Hal ini menjadikan tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD ini tidak dilakukan begitu saja. Masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota BPD. Orang-orang yang menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

### 4. Fasilitas operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya.

Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang kinerja anggota BPD, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BPD di desa ini.

#### **b. Faktor Ekstern yang berasal dari luar lingkungan BPD**

##### **1. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan perannya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Disini dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat mengatakan kinerja BPD baik atau memuaskan. Namun, masih ada sebagian kecil

masyarakat yang kurang puas atau merasakan bahwa kinerja BPD masih kurang baik. Masyarakat, tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Kepala Dusun Sekaligus Tokoh Masyarakat, Bapak Syamsul yang mengatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. (Wawancara, 10 Desember 2012)

## 2. Pengetahuan Masyarakat

Tidak berhasilnya BPD menjalankan fungsinya karena masyarakat pulau tengah tidak memiliki pengetahuan yang konkret tentang hal-hal apa saja yang akan disalurkan kepada pemerintah desa serta kepada siapa harus menyalurkan aspirasi mereka.

### 3. Turun lapangan/Hearing

Anggota BPD terkadang jarang mengadakan hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat pulau tengah, hal ini pula yang menyebabkan masyarakat tak bisa menyapaikan aspirasi mereka secara langsung kepada BPD.

Jadi dalam menjalankan peran di desa BPD seringkali mengalami permasalahan-permasalahan lain, sehingga sebagian masyarakat berasumsi karena sudah menjadi tugas dari BPD untuk menyelesaikan permasalahan itu, karena mereka adalah wakil masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Peranan BPD yang meliputi legislasi, melakukan pengawasan, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pertimbangan mengenai kerja sama desa.

- a. Legislasi

Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Tengah dalam legislasi belum melaksanakannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 40 (53,33%). Adapun kendala yang dihadapi oleh BPD dalam legislasi tersebut adalah kurang nya BPD mengikuti kegiatan rapat dengan pemerintah desa dalam membuat program-program desa, sehingga saat ini peraturan yang di buat oleh BPD tidak ada. Inilah yang menjadi polemik dimana Dengan tidak adanya peraturan yang dibuat akan menghambat pembangunan desa.

b. Pengawasan

Peran BPD dalam pengawasan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan jawaban yang diberikan oleh responden yang menjawab belum terlaksana dengan baik sebanyak 48 (64%). Adapun kendala yang di hadapi BPD tersebut adalah tidak adanya koordinasi antar sesama anggota BPD dan pemerintah desa sehingga menyebabkan sulit untuk terlaksananya peran BPD dalam pengawasan karena kesibukan dari masing-masing anggota BPD. Inilah yang menyebabkan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa BPD hanya setuju saja tanpa mengawasi lebih lanjut keputusan tersebut.

c. Menampung, dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan jawaban responden yang menjawab belum sebanyak 64 (85,33%). Adapun penyebab atau kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah tidak ada nya BPD turun langsung ke masyarakat menyebabkan sulitnya terlaksana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan kurang nya perhatian atau sikap cuek dari para anggota BPD terhadap permasalahan masyarakat.

d. Pertimbangan kerja sama desa

Peran BPD dalam memberikan pertimbangan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab belum berjalan dengan baik sebanyak 40 (53.33%). Penyebab dari tidak berjalan peran tersebut



dikarenakan tidak adanya koodinasi antar anggota BPD dengan pemerintah desa dan tidak tegasnya ketua BPD terhadap anggota.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

a. Faktor internal BPD yaitu

- a. Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa
- b. Pendapatan/insentif
- c. Rekrutment/Sistem pemilihan anggota BPD
- d. Fasilitas operasional

b. Faktor eksternal BPD yaitu

- a. partisipasi masyarakat
- b. pengetahuan
- c. Hearing/dengar pendapat

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa semua peran yang dilakukan oleh BPD di desa pulau tengah kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi belum terlaksana dengan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada BPD agar dalam menjalankan perannya seperti berikut:

a. Legislasi

Sebaiknya semua anggota BPD harus mengikuti setiap rapat yang diadakan oleh pemerintah desa dengan masyarakat untuk membuat program-program pembangunan desa. Jika hanya ketua BPD saja

yang mengikuti rapat tersebut, maka pelaksanaan peran BPD tidak akan terlaksana sehingga masyarakat akan menganggap BPD hanya formalitas yang mengharapkan gaji.

b. Pengawasan

Pada umumnya masyarakat di desa mengharapkan BPD bisa meluangkan waktu dalam melakukan koordinasi antara ketua BPD dengan anggota BPD. Sehingga bisa memaksimalkan peran BPD dalam pengawasan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

c. Menampung, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Diharapkan kepada BPD supaya sering untuk turun lapangan atau dengar pendapat dengan masyarakat sehingga BPD tahu dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya turun lapangan serta dengar pendapat dengan masyarakat maka setiap aspirasi yang masuk akan mendapatkan suatu penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

d. Memberikan pertimbangan kerja sama desa

Agar terlaksana suatu koordinasi dan komunikasi dalam memberikans pertimbangan kerja sama desa maka anggota BPD harus fokus dengan apa yang menjadi tugasnya. Jika tidak adanya koordinasi dan komunikasi dengan baik maka akan terjadi kesalahpahaman antar anggota BPD dengan pemerintah desa, ini akan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa dan

masyarakatlah yang akan dirugikan. Selain itu ketua BPD harus memiliki jiwa pemimpin yang tegas sehingga bawahan bisa mencontahnya dengan baik.

Jadi saran yang harus diperhatikan dari semua aspek peran tersebut adalah baik itu Legislasi, pengawasan, menampung, dan menyalurka aspirasi masyarakat, dan memberikan pertimbangan kerja sama desa harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Bila perlu, melibatkan partisipasi dari semua pihak agar tercapainya pembangunan desa yang lebih baik dan masyarakat nya pun sejahtera. Hal ini, sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan yang memang betul-betul harus dilaksanakan jangan hanya sekedar retorika semata.

2. Kepada masyarakat agar selalu berpartisipasi dalam setiap rapat yang diadakan di desa dan memberikan kritikan kepada BPD dan pemerintah desa, Selain itu masyarakat harus mendukung program-program desa agar tercapainya pembangunan desa yang lebih baik.
3. bagi peneliti selanjutnya, yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis agar lebih dalam lagi melakukan hal pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran BPD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, Prof. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2005.
- Arif Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press. Pekanbaru.2007.
- Cahyano Heru. *Konflik Elit Politik Di Pedesaan*. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2005.
- D. Juliantara, dkk. *Desentralisasi Kerakyatan*. Pondok Edukasi Bantul. 2006.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta.2007
- Hasibuan Albert, Sutarno. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002.
- Ishak Arep, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Motivasi*, PT.Gramedia Mediasarana Indonesia : Jakarta.2003.
- J. Kaloh, DR. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rineka cipta. 2007.
- Novliadi, Ferry. *Hubungan antara Organization-Based Self Esteem Dengan Etis Kerja*, Thesis; Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara: Medan. 2009.
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.2011.
- Rivai Veithzal, 2003, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi Kedua), PT.Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Rucky Achmad, 2006, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Sinamo, Jansen, 2002, *Etos Kerja Profesional*, Darma Mahardika: Jakarta.2005, *Etos Kerja Profesional*, Darma Mahardika: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta. 2004.
- Singarimbun Masri, Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. 2006.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi Negara*, PT.Rajagrafindo Persada : Jakarta. 2004.

- Tim LIPI. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta. 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa.
- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono Sadu, Irwan Taher. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokus Media. Bandung. 2006.
- Widjajah HAW, Prof. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarata. 2005. *Otonomi Desa*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2003.